



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN MUNA TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
  - b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peta jalan (*road map*) dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022-2024

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
6. Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah.

##### Pasal 2

Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022-2024 merupakan pedoman bagi perangkat daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Muna selama 3 (tiga) tahun.



Pasal 3

Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
PEMBIAYAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 – 2024 bersumber dari :




1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 25-5 2022

BUPATI MUNA.

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha,  
pada tanggal 25-5 2022

SEKRETARIS DAERAH,

  
EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR ...

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR **50** TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETA JALAN (ROAD MAP) PENGENDALIAN INFLASI  
 DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022-2024

PETA JALAN (ROAD MAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022-2024

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIMELINE TARGET			KETERANGAN
			2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
<b>KETERJANGKAUAN HARGA</b>	Stabilisasi Harga	Efektivitas Kegiatan Operasi Pasar (OP)/ Ketersediaan Pasokan dan StabilitasHarga (KPSH) untuk komoditi beras maupun komoditas lain penyumbang inflasi utama di titik – titik distribusi utama	1. Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai kebijakan Kementerian Perdagangan 2. Sasaran Komoditi : Beras sebagai program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan komoditi pangan lainnya	1. Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai kebijakan Kementerian Perdagangan 2. Sasaran Komoditi : Beras sebagai program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan komoditi pangan lainnya	1. Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai kebijakan Kementerian Perdagangan 2. Sasaran Komoditi : Beras sebagai program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan komoditi pangan lainnya	Dilaksanakan oleh Bulog Capem Raha; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna



		Stabilisasi harga komoditi premium, goreng, tepung daging sapi dan telur ayam melalui Operasi Pangan dan Pasar Murah	Stabilisasi harga beras premium, gula pasir, terigu, sapi dan ayam melalui Pasar Pangan dan Pasar Murah	Beras Premium, Goreng, Pasir, Terigu, Sapi dan Ayam	Beras Premium, Goreng, Pasir, Terigu, Sapi dan Ayam	Beras Premium, Goreng, Pasir, Terigu, Sapi dan Ayam	Beras Premium, Goreng, Tepung Daging Sapi dan Ayam	Dilaksanakan oleh Perum Bulog Capem Raha, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Muna
		Program Murah pendistribusian barang kebutuhan pokok secara <i>bundling</i> , saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) <i>just in time</i> pengendalian harga	Pasar Murah melalui pendistribusian barang kebutuhan pokok secara <i>bundling</i> , saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) <i>just in time</i> pengendalian harga	Penyediaan minimal 500 paket sembako, diutamakan pada kecamatan kantong kemiskinan	Penyediaan minimal 1.000 paket sembako, diutamakan pada kecamatan kantong kemiskinan	Penyediaan minimal 1.200 paket sembako, diutamakan pada kecamatan kantong kemiskinan	Penyediaan minimal 1.200 paket sembako, diutamakan pada kecamatan kantong kemiskinan	Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna

		Optimalisasi Toko Tani Indonesia sebagai stabilisator harga di tingkat masyarakat	Penyusunan Rencana Bisnis dan Pembangunan/ Penyediaan Operasional TOKO TANI INDONESIA – Kab. Muna	1. Pembangunan Toko Tani Indonesia (TTI) 1 unit	1. Pelaksanaan bazaar dilakukan secara harian (Senin – Jumat) 2. Komoditas beras, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, sayuran 3. Penjualan Harga Bahan Pangan Pokok dengan harga di bawah harga pasar	Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan
		Penambahan Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)			Minimal 1 TTI	Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan



		Pemantauan harga pangan pokok di pasar tradisional dan toko swalayan di seluruh wilayah Kabupaten Muna	1. Pemantauan harga secara berkala setiap hari untuk 24 jenis komoditas di pasar Laino; (1) Tampo; dan (3) Tongkuno 2. Pemantauan toko swalayan di Kabupaten Muna	1. Pemantauan harga secara berkala setiap hari untuk 24 jenis komoditas di pasar Laino; (2) Tampo; dan (3) Tongkuno 2. Pemantauan toko swalayan di Kabupaten Muna	1. Pemantauan harga secara berkala setiap hari untuk 24 jenis komoditas di pasar Laino; (2) Tampo; dan (3) Tongkuno 2. Pemantauan toko swalayan di Kabupaten Muna	Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan & Perindustrian; Satgas Pangan POLRES Muna; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Perikanan
		Posko Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Pos pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar Pasar Laino; Pasar Tampo dan Pasar Tongkuno, 5 hari sebelum hari H dan 2 hari sesudah hari H	Pos pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar Pasar Laino; Pasar Tampo dan Pasar Tongkuno, 5 hari sebelum hari H dan 2 hari sesudah hari H	Pos pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar Pasar Laino; Pasar Tampo dan Pasar Tongkuno, 5 hari sebelum hari H dan 2 hari sesudah hari H	Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Satgas pangan POLRES Muna
		Maklumat pengendalian harga kepada seluruh distributor dan pedagang komoditas pangan di Kabupaten Muna	Harga pangan tetap menjelang libur nasional dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Harga pangan pokok tetap menjelang hari libur nasional dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Harga pangan pokok tetap menjelang hari libur nasional dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Dilaksanakan oleh Satgas Pangan POLRES Muna

		Penyediaan bus angkutan penumpang murah	Bus angkutan penumpang tersedia di wilayah kecamatan yang tidak/kurang lancar trayeknya dari dan ke kota Raha, 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri	Bus angkutan penumpang tersedia di wilayah kecamatan yang tidak/kurang lancar trayeknya dari dan ke kota Raha, 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri	Bus angkutan penumpang tersedia di wilayah kecamatan yang tidak/kurang lancar trayeknya dari dan ke kota Raha, 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
	Mengelola Permintaan	Sosialisasi gerakan makan ikan air tawar/payau dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi ikan air laut		Gerakan Makan Ikan Air Tawar/Payau; Lomba Masak Ikan Air Serba Ikan Air Tawar/Payau	Gerakan Makan Ikan Air Tawar/Payau; Lomba Masak Ikan Air Serba Ikan Air Tawar/Payau	Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan
		Gerakan Pangan Bergizi dan Aman (B2SA)		Lomba Menu Lokal Cipta Pangan	Lomba Cipta Menu Pangan Lokal	Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan



<p style="text-align: center;"><b>KETERSEDIAAN PASOKAN</b></p>	<p>Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok</p>	<p>Menjaga ketersediaan beras medium dalam jumlah yang cukup sebagai Cadangan Beras Pemerintah baik untuk kegiatan KPSH OP-CBP dalam rangka stabilisasi harga maupun untuk penyaluran bantuan dalam kondisi darurat</p>	<p>Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat, BULOG akan menyediakan kebutuhan pokok dan penting untuk cadangan 3 bulan ke depan</p>	<p>Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat, BULOG akan menyediakan kebutuhan pokok dan penting untuk cadangan 3 bulan ke depan</p>	<p>Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat, BULOG akan menyediakan kebutuhan pokok dan penting untuk cadangan 3 bulan ke depan</p>	<p>Dilaksanakan oleh BULOG Capem Raha</p>
	<p>Pakta Integritas Pelaku Usaha</p>	<p>Melaksanakan penyuluhan, penandatanganan pakta integritas dan pengawasan terhadap pedagang, para pelaku usaha distributor</p>	<p>Menjaga ketersediaan Bahan Pangan Pokok untuk memenuhi kebutuhan Operasi Pasar, Pasar Murah dan Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</p>	<p>Menjaga ketersediaan stok stabilisasi Bahan Pokok</p>	<p>Menjaga ketersediaan stok stabilisasi Bahan Pokok</p>	<p>Dilaksanakan oleh Satgas Pangan POLRES Muna</p>

	<p>Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah dan Pengelolaan Ekspor Impor</p>	<p>Pengembangan komoditas :  a. Padi  b. Jagung  c. Ubi kayu  d. Cabai besar  e. Cabai rawit  f. Sayuran</p>	<p>Peningkatan produktivitas sebesar 5 % pertahun</p>	<p>Peningkatan produktivitas sebesar 5 % pertahun</p>	<p>Peningkatan produktivitas sebesar 5 % pertahun</p>	<p>Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan</p>
		<p>Pengembangan agribisnis kelapa :  a. Penanaman kelapa  b. Unit Pengolahan Hasil</p>	<p>Peningkatan produktivitas sebesar 5 % pertahun</p>	<p>Peningkatan produktivitas sebesar 5 % pertahun</p>	<p>Peningkatan produktivitas sebesar 5 % pertahun</p>	<p>Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p>



		Peningkatan Populasi Peternakan				Dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		<p>1. Sapi potong meningkat dari 68.042 ekor menjadi 74.386 ekor</p> <p>2. Kambing meningkat dari 16.142 ekor menjadi 16.465 ekor</p> <p>3. Ayam buras meningkat dari 1.686.697 ekor menjadi 1.740.531 ekor</p> <p>4. Ayam ras petelur meningkat dari 29.050 ekor menjadi 34.150 ekor</p> <p>5. Ayam ras pedaging meningkat dari 89.200 ekor menjadi 95.450 ekor</p>		<p>1. Sapi potong meningkat menjadi 78.105 ekor</p> <p>2. Kambing menjadi 17.288 ekor</p> <p>3. Ayam buras meningkat menjadi 1.827.557 ekor</p> <p>4. Ayam ras petelur meningkat menjadi 35.857 ekor</p> <p>5. Ayam ras pedaging meningkat menjadi 100.222 ekor</p>	<p>1. Sapi potong meningkat menjadi 82.010 ekor</p> <p>2. Kambing menjadi 18.152 ekor</p> <p>3. Ayam buras meningkat menjadi 1.918.934 ekor</p> <p>4. Ayam ras petelur meningkat menjadi 37.650 ekor</p> <p>5. Ayam ras pedaging meningkat menjadi 105.230 ekor</p>	

		<p>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</p>	<p>1. Padi meningkat dari 4.041,7 ton menjadi 4.243,8 ton</p> <p>2. Jagung meningkat dari 36.880 ton menjadi 38.724,5 ton</p> <p>3. Ubu meningkat dari 16.618 ton menjadi 17.448,9 ton</p>	<p>1. Padi meningkat menjadi 4.456 ton</p> <p>2. Jagung meningkat menjadi 40.660,8 ton</p> <p>3. Ubi meningkat menjadi 18.321,3 ton</p>	<p>1. Padi meningkat menjadi 4.678,8 ton</p> <p>2. Jagung meningkat menjadi 42.693,8 ton</p> <p>3. Ubu meningkat menjadi 19.237,4 ton</p>	<p>Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p>
		<p>Peningkatan Produksi Hortikultura</p>	<p>1. Sayuran buah semusim meningkat dari 3.819,5 ton menjadi 4.010,5 ton</p> <p>2. Buah dan sayuran tahunan meningkat dari 25.794,4 ton menjadi 27.084,2 ton</p>	<p>1. Sayuran buah semusim meningkat menjadi 4.211 ton</p> <p>2. Buah dan sayuran tahunan meningkat menjadi 28.438,3 ton</p>	<p>1. Sayuran buah semusim meningkat menjadi 4.421,6 ton</p> <p>2. Buah dan sayuran tahunan meningkat menjadi 29.860,3 ton</p>	<p>Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p>



		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejala harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat						
	Penambahan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Bertambah 3 kelompok yang terdiri dari 3 kelompok (APBD)	Bertambah 2 kelompok yang terdiri dari 1 kelompok (APBN) dan 1 kelompok (APBD)	Bertambah 2 kelompok yang terdiri dari 1 kelompok (APBN) dan 1 kelompok (APBD)	Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan			
	Peningkatan Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Bertambah 5 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Bertambah 5 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Bertambah 5 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan			
	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ikan konsumsi)	Produksi perikanan tangkap (ikan konsumsi) meningkat dari 10.805,54 ton menjadi 11.129,70 ton	Produksi perikanan tangkap (ikan konsumsi) menjadi 11.463,606 ton	Produksi perikanan tangkap (ikan konsumsi) menjadi 11.807,51 ton	Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan			

		Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan konsumsi)	Produksi perikanan budidaya (Ikan konsumsi) meningkat dari 60,81 ton menjadi 66,89 ton	Produksi perikanan budidaya (Ikan konsumsi) menjadi 73,58 ton	Produksi perikanan budidaya (Ikan konsumsi) menjadi 80,94 ton	Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan
		Sosialisasi dan Monitoring Penerapan Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi	Terdaftar minimal 1 distributor bahan pokok dan penting baru di seluruh Kabupaten Muna	Terdaftar minimal 1 distributor bahan pokok dan penting baru di seluruh Kabupaten Muna	Terdaftar minimal 1 distributor bahan pokok dan penting baru di seluruh Kabupaten Muna	Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Memperkuat Kelembagaan	Penyiapan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)	Sosialisasi dan persiapan sistem operasional SRG kelembagaan SRG	Pembangunan dan penyediaan Operasional SRG	pembenahan sistem operasional serta penguatan kelembagaan SRG	Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian



		<p>Pemberian bantuan modal kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) untuk stabilisasi harga ditingkat produsen dengan pembelian hasil produksi berupa padi/jagung sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP)</p>			<p>Penambahan minimal 1 unit Gapoktan LPDM</p>	<p>Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Koperasi dan UKM</p>
		<p>Pemberian bantuan modal dan operasional kepada Gapoktan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) untuk stabilisasi harga ditingkat konsumen dan memotong rantai distribusi beras</p>	<p>1. Melalui APBN untuk Gapoktan PUPM Komoditi Beras</p>	<p>1. Melalui APBN untuk Gapoktan PUPM Komoditi Beras 2. Melalui APBD untuk 1 PUPM komoditi bawang dan cabai</p>	<p>1. Melalui APBN untuk Gapoktan PUPM Komoditi Beras dan .... TTY 2. Melalui APBD untuk 2 PUPM komoditi bawang dan cabai, serta ..... TTY</p>	<p>Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan</p>

		<p>Penguatan Kelembagaan Pedagang melalui kerjasama dengan <i>digital platform</i> dalam metode distribusi pangan</p>		<p><i>Businessmatching</i> dan pengembangan teknologi pendukung</p>	<p>Implementasi kerjasama dengan <i>digital platform</i></p>	<p>Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Bank Indonesia Sultra; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p>
--	--	---	--	---	--	---

		Penguatan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui metode klaster	Pembinaan klaster pangan/tahun	1	Pembinaan klaster pangan/tahun	1	Pembinaan klaster pangan/tahun	1	Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perikanan
<b>KELANCARAN DISTRIBUSI</b>	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	Perluasan Pangan Kita (RPK) sebagai distribusi pangan murah di tingkat rumah tangga			Penambahan jumlah minimal 1 unit / tahun	RPK /	Penambahan jumlah minimal 1 unit / tahun	RPK /	Dilaksanakan oleh BULOG Capem Raha



		<p>Meningkatkan pelayanan penjualan langsung komoditi melalui Sembako Hari Keagamaan, CSR <i>(Corporate Social Responsibility)</i>, Paket Sembako karyawan bekerjasama dengan BUMN dan instansi lain, Penjualan Murah (Bazaar, Pameran)</p>	<p>Dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan atau sesuai permintaan instansi konsumen, serta perluasan jaringan penjualan langsung mandiri</p>	<p>Dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan atau sesuai permintaan instansi konsumen, serta perluasan jaringan penjualan langsung mandiri</p>	<p>Dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan atau sesuai permintaan instansi konsumen, serta perluasan jaringan penjualan langsung mandiri</p>	<p>Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Bagian Perencanaan SETDA</p>
--	--	---	---	---	---	--

Mendorong Kerjasama Antar Daerah	Pengembangan model bisnis kerjasama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerjasama antar daerah untuk komoditas bahan pangan pokok	1. Pengembangan <i>bussines model</i> antara daerah surplus dan daerah distribusi 2. Komoditas beras, daging ayam, sapi dan perikanan	1. Pengembangan <i>bussines model</i> antara daerah surplus dan daerah distribusi 2. Komoditas beras, daging ayam, sapi dan perikanan	1. Pengembangan <i>bussines model</i> antara daerah surplus dan daerah distribusi 2. Komoditas beras, daging ayam, sapi dan perikanan	Dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perikanan		
Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang	<i>Review</i> Perencanaan Angkutan Barang	<i>Bussines plan</i> Terminal Angkutan Barang di Kabupaten Muna sebanyak 1 lokasi	Appraisal Terminal Angkutan Barang di Kabupaten Muna 1 lokasi	Pengadaan Tanah untuk Terminal Angkutan Barang di Kabupaten Muna 1 lokasi	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan		

<p><b>KOMUNIKASI EFEKTIF</b></p>	<p>Memperbaiki Kualitas Data</p>	<p>Pemantauan, pengadaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data bahan pokok di website (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Sistem Informasi Cadangan Pangan, Sistem Panel Harga, aplikasi pertanian.go.id</p>	<p>Tersedia harga di tingkat konsumen, produsen, grosir dan eceran di 3 pasar utama BPS (Laino, Tampo dan Tongkuno)</p>	<p>Tersedia harga di tingkat konsumen, produsen, grosir dan eceran di 3 pasar utama BPS (Laino, Tampo dan Tongkuno)</p>	<p>Tersedia harga di tingkat konsumen, produsen, grosir dan eceran di 3 pasar utama BPS (Laino, Tampo dan Tongkuno)</p>	<p>Dilaksanakan oleh Satgas Pangan POLRES Muna; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p>
--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	--



		Penguatan kualitas statistik harga bahan makanan	Strategi pencatatan harga antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Satgas Pangan POLRES Muna; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Bank Indonesia Sulawesi Tenggara dan BPS Muna	Strategi pencatatan harga antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Satgas Pangan POLRES Muna; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Bank Indonesia Sulawesi Tenggara dan BPS Muna	Strategi pencatatan harga antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Satgas Pangan POLRES Muna; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Bank Indonesia Sulawesi Tenggara dan BPS Muna	Dilaksanakan oleh Dinas Perindustri dan Perdagangan; Satgas Pangan POLRES Muna; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Bagian Perekonomian; BI Sultra dan BPS Kab. Muna
		Penguatan Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, termasuk stok		Ketersediaan data dari produksi perikanan tangkap dan budidaya, dan pengolahan pemasar, konsumen, keluar masuk Kabupaten Muna	Ketersediaan data dari produksi perikanan tangkap dan budidaya, dan pengolahan pemasar, konsumen, keluar masuk Kabupaten Muna	Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan

		Integrasi data pemantauan harga bahan pangan pokok melalui PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis)		Data pasar tradisional dan modern, masing - masing 2 pasar	Data pasar tradisional dan modern, masing - masing 2 pasar	Dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan Setda; Bank Indonesia Sulawesi Tenggara
Memperkuat Koordinasi Pusat Daerah	Rapat Koordinasi Nasional Keagamaan Nasional (HBKN)	Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Rapat Koordinasi HKBN dengan stakeholder terkait, usaha instansi dan toko swalayan	Rapat Koordinasi HKBN dengan stakeholder terkait, usaha instansi dan toko swalayan	Rapat Koordinasi HKBN dengan stakeholder terkait, usaha instansi dan toko swalayan	Dilaksanakan oleh TPIN dan diikuti TPID Kabupaten Muna
	Rapat Koordinasi Daerah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Rapat Koordinasi HKBN dengan stakeholder terkait, usaha instansi dan toko swalayan	Rapat Koordinasi HKBN dengan stakeholder terkait, usaha instansi dan toko swalayan	Rapat Koordinasi HKBN dengan stakeholder terkait, usaha instansi dan toko swalayan	Rapat Koordinasi HKBN dengan stakeholder terkait, usaha instansi dan toko swalayan	Dilaksanakan oleh TPID Provinsi Sultra dan diikuti TPID Kabupaten Muna

		Pelaksanaan Rakornas, Koordinasi dan (Rakorpusda) dan Koordinasi (Rakorda) TPID	Rakorpusda 1x/tahun Rakorda 1x/tahun	Rakorpusda 1x/tahun dan Rakorda 1x/tahun	Rakorpusda 1x/tahun dan Rakorda 1x/tahun	Dilaksanakan oleh TPIN dan TPID Povinsi Sultra dan diikuti Bagian Perekonomian SETDA Kab. Muna
		Penguatan kelembagaan antar instansi anggota TPID Kabupaten Muna melalui program <i>capacity building</i>		Peningkatan pemahaman peserta <i>capacity building</i> melalui <i>pre</i> dan <i>post test</i>	Peningkatan pemahaman peserta <i>capacity building</i> melalui <i>pre</i> dan <i>post test</i>	Dilaksanakan oleh Bank Indonesia Sulawesi Tenggara
		Memperkuat koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Sultra/Muna dalam penyusunan buku dakwah inflasi		Penyusunan buku <i>guidance</i> dakwah inflasi ulama/dai bagi masyarakat	Penyusunan buku <i>guidance</i> pengendalian inflasi bagi masyarakat	Dilaksanakan oleh Bank Indonesia Sulawesi Tenggara



		Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media cetak dan elektronik	Melalui cetak elektronik dan media elektronik	Melalui cetak elektronik dan media elektronik	Melalui cetak elektronik dan media elektronik	Dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian SETDA
		Penegakan hukum	Sesuai kasus	Sesuai kasus	Sesuai kasus	POLRES Muna

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
UNIT/SAITUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA,

*[Signature]*  
 LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA